

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Apatisme

apatisme ialah sikap yang dimiliki orang yang tidak berminat dan tidak punya perhatian kepada orang lain, situasi, baik gejala-gejala umum atau khususnya.¹ yang ada dalam masyarakat. orang yang apatis akan bersifat acuh tak acuh terhadap segala kondisi yang sedang terjadi, mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri dengan berbagai alasan yang mereka miliki, orang apatis adalah orang yang pasif, yang lebih mengandalkan perasaan dalam menghadapi permasalahan. ketidakmampuan melaksanakan tanggungjawabnya baik sebagai pribadi maupun sebagai masyarakat dan selalu terancam.

B. Politik

Politik (politics) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha menggapai the good life ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu. Masyarakat mengambil keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu dan hal ini menyangkut pilihan antara beberapa alternatif serta urutan prioritas dari tujuan-tujuan yang

¹ Michael Rush Dan Philip Altrhoff, *Pengantar Sosiologi Politik*. Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2013 hal.143

telah ditentukan itu.²

Menurut Aristoteles politik adalah usaha yang di tempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Menurut miriam Budiardjo politik adalah bermacam-macam kegiatan dari suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem Indonesia dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Menurut nisjwara poliitk adalah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan/tehknik untuk menjalankan kekuasaan/masalah-masalah pelaksanaan dan kontrol kekuasaan/pembentukan dan penggunaan kekuasaan. Menurut Sri Sumantri politik adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia yang di lembaga kan dalam bermacam-macam badan politik baik suprastruktur politik dan infrastruktur politik.³

Profesor Leo Straus mengungkapk an hasil penelitian nya terhadap dasar-dasar politik yang meliputi dua kelompok yaitu, 1). Sifat institusi dan kekuatan-kekuatan politis seperti organisasi-organisasi pemerintah, hukum, program, kelompok-kelompok kepentingan, kekuasaan dan kebiasaan-kebiasaan sosial. 2). Tatanan politik yang baik atau jujur secara moral.⁴

Siyasat bisa juga berarti pemerintahan dan politik atau membuat kebijakan, abdul wahhab khallaf mengutip ucapan al-maqrizi menyatakan, arti kata siyasat adalah mengatur. Jadi siyasah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan,

² Miriam Budiardjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007 Hal 15

³ Thomas Tokan Pureklolon. 2020. *Perilaku politik*. Jakarta: obor Indonesia hal.20

⁴ Henry J Schmandt, *filsafat politik* (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002). Hlm 4

pemerintah dan politik.⁵

Dengan demikian kita sampai pada kesimpulan bahwa politik selalu berkaitan dengan masalah kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijakan publik (public policy), organisasi pemerintahan, kelompok kepentingan dan alokasi atau distribusi (allocation or distribution). sehingga politik sangat penting dalam suatu negara untuk mengatur dan mengelola negara tersebut agar tercipta kedamaian, keamanan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat.

c. Apatisme Politik

David F. Roth dan Frank L. Wilson menyebut apatisme politik adalah kelompok yang tidak peduli dengan politik atau tidak melibatkan diri dengan kegiatan politik.⁶

Secara garis besar apatisme politik adalah sikap yang di miliki orang yang tidak berminat dan tidak punya perhatian terhadap orang lain, situasi baik gejala umum atau khusus yang ada dalam masyarakat.

Morris Rosenberg dalam buku Michael Rush berpendapat jika ada tiga alasan pokok orang bersikap apatis terhadap politik.⁷ diantaranya yaitu:

1. Karena ketakutan akan konsekuensi negatif dari aktivis politik. Orang beranggapan jika aktivitas politik merupakan ancaman untuk kehidupannya.
2. Karena anggapan orang-orang jika berpartisipasi dalam kehidupan politik merupakan hal yang sia-sia. Berpartisipasi atau tidaknya mereka dalam

⁵ J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyazah*, Penerbit Ombak, Yogyakarta:2014 hal.25

⁶ Efriza dan Yoyoh Rohaniah, *pengantar ilmu politik, kajian mendasar ilmu politik* (malang: Intrans Publishing,2015), hal. 490

⁷ Ibid hal.144

politik tidak memiliki dampak pada proses politik.

3. Tidak adanya ketertarikan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.
Bahkan politik bukan hal yang harus ditekuni sehingga mengalahkan hal lain untuk dilakukannya.

D. Generasi Milenial

Menurut manheim generasi adalah suatu konstruksi sosial yang didalamnya terdapat sekelompok orang yang memiliki kesamaan umur dan pengalaman historis yang sama, peneliti lain juga mengemukakan bahwa generasi adalah sekelompok individu yang mengidentifikasi kelompoknya berdasarkan kesamaan tahun kelahiran, umur, lokasi, dan kejadian-kejadian dalam kehidupan kelompok individu tersebut yang memiliki pengaruh signifikan dalam fase pertumbuhan mereka.⁸

Istilah milenial pertama kali dicetuskan oleh william straus dan neil dalam bukunya yang berjudul *milleniaals rising : the next great generation (2000)*. mereka menciptakan istilah ini tahun 1987 yaitu pada saat anak-anak yang lahir pada tahun 1982 masuk pra sekolah. saat itu media media menyebut sebagai kelompok yang terhubung sebagai milenium baru disaat lulus SMA tahun 2000.

Jika didasarkan pada *generation theory* yang dicetuskan oleh Howe dan Straus generasi milenial adalah generasi yang lahir pada rasio tahun 1982 sampai sampai dengan 2000. generasi milenial jua disebut sebagai generasi Y.

⁸ Kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, *profil generasi milenial indonesia*. Hlm.13

Tabel.1
pengelompokan generasi

Sumber		Label			
Tapscott (1998)	-	Baby Boom Generation (1946-1964)	Generation X (1965-1975)	Digital Generation (1976-2000)	-
Howe & Strauss (2000)	Silent Generation (1925-1943)	Boom Generation (1943-1960)	13 th Generation (1961-1981)	Millennial Generation (1982-2000)	-
Zemke et al (2000)	Veterans (1922-1943)	Baby Boomers (1943-1960)	Gen-Xers (1960-1980)	Nexters (1980-1999)	-
Lancaster & Stillman (2002)	Traditionalist (1900-1945)	Baby Boomers (1946-1964)	Generation Xers (1965-1980)	Generation Y (1981-1999)	-
Martin & Tulgan (2002)	Silent Generation (1925-1942)	Baby Boomers (1946-1964)	Generation X (1965-1977)	Millennials (1978-2000)	-
Oblinger & Oblinger (2005)	Matures (<1946)	Baby Boomers (1947-1964)	Generation Xers (1965-1980)	Gen-Y/NetGen (1981-1995)	Post Millennials (1995-present)

Sumber : Teoritical Review: Teori Perbedaan Generasi Oleh Yanuar Surya Putra (2016)

Dari sisi pendidikan generasi milenial cenderung memiliki kualitas pendidikan yang lebih unggul. Generasi milenial menyadari bahwa pendidikan merupakan prioritas yang utama. Jadi dengan pola pikir yang terbuka, bebas, kritis dan berani adalah suatu modal yang berharga.⁹

Generasi milenial juga ditandai dengan peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi, media, dan teknologi digital. Karena dibesarkan oleh teknologi generasi milenial memiliki ciri-ciri kreatif, informatif dan inovatif. Bukti nyata yang dapat diamati adalah generasi milenial hampir semua memiliki akun sosial media yang digunakan untuk berkomunikasi dan mencari informasi baik dibidang ekonomi budaya dan

⁹ Kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, *profil generasi milenial indonesia*. Hlm.18

politik. Generasi ini mempunyai karakteristik komunikasi yang terbuka, pengguna media sosial yang fanatik, kehidupannya sangat terpengaruh dengan perkembangan teknologi, serta lebih terbuka dengan pandangan politik dan ekonomi. Sehingga, mereka terlihat sangat reaktif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di sekelilingnya.¹⁰

E. Politik Pemuda

Generasi muda pra kemerdekaan telah menghabiskan waktu mereka untuk mengurus masalah-masalah yang murni bersifat politik, baik menyangkut kemerdekaan, melawan imperialisme dan gerakan-gerakan sosial lainnya seringkali manifestasinya bersifat non-kooperatif terhadap pemerintah Hindia Belanda. Gerakan politik kaum muda pra kemerdekaan memiliki cita-cita yang jelas dan idealisme yang kuat yakni mewujudkan Indonesia merdeka. Oleh sebab itu, gerakan politik kaum muda memiliki basis ideologi yang jelas dalam perpolitikan Indonesia.¹¹

Kaum muda pun dalam beberapa kontestasi politik pasca Orde Baru memiliki kecenderungan pada kekuasaan oligarki semakin tampak, idealisme sebagai kaum muda sudah kehilangan magnetnya untuk membawa perubahan politik, sementara pragmatisme politik semakin menonjol. Sebagian kaum muda melakukan transmisi ke beberapa partai politik dengan cita-cita yang tidak tunggal, umumnya mengharapkan legitimasi kekuasaan.¹²

Dinamika politik yang semakin mengukuhkan praktek yang tidak bermoral tersebut memerlukan adanya energi baru yang positif untuk

¹⁰ Ibit hal.18

¹¹ Lihat John Ingleson, *Jalan ke Pengasingan: Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934*, (Jakarta: LP3ES, 1982)

¹² Syarifudin Jurdi, *Dinamika Politik Kaum Muda Indonesia: Dialektika Politik Nasional dan Lokal*

merekonstruksi permainan politik agar lebih anggun, santun dan beradab. Kaum muda perlu mengambil prakarsa dalam mengubah citra politik bangsa, tahun 2009 dapat menjadi momentum kemunculan kaum muda dalam pentas politik nasional, dengan catatan harus membawa energi baru yang positif bagi perbaikan bangsa. Wacana kepemimpinan kaum muda yang mencuat beberapa waktu yang lalu dapat menjadi suatu catatan penting bagi kaum muda dalam merencanakan bentuk keterlibatannya dalam politik. Ingat, politik tidak identik dengan masuk partai, masuk birokrasi, masuk lembaga-lembaga negara, tetapi politik dapat dilakukan dengan cara-cara yang bersifat edukatif, mendesain program pemberdayaan rakyat dan mewujudkan sistem kelembagaan *civil society* yang mandiri dan kuat.

F. Pemerintahan Desa

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh, dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa telah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari undang-undang desa. Pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Susunan tata kerja pemerintahan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja (SOT) Pemerintahan

Desa, antara lain:

1. Sekretaris desa. Sekretaris desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa dan dibantu oleh staf sekretaris. Sekretaris desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan, yaitu urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan (Kaur). Semua itu sesuai Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa;
2. Pelaksana kewilayahan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlahnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain. Tugas kewilayahan meliputi, penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
3. Pelaksana teknis. Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, Pasal 5 ayat (1), (2), dan ayat (3), pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan, dan paling

sedikit terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan pelayanan.

Peranan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat menuju kesejahteraan adalah bersifat persuasif untuk merencanakan, menciptakan, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan sumber daya atau potensi baik sumber daya manusia (SDM) atau sumber daya alam (SDA) yang dapat berhasil guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa diantaranya yaitu pengelolaan keuangan desa/dana desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa untuk menciptakan ketertiban, kerukunan, keamanan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

G. Masyarakat Desa

Hasan Shadly (1963:20) memberikan pengertian masyarakat sebagai golongan besar atau kecil dari beberapa manusia yang dengan sendirinya bertalian golongan dan mempunyai pengaruh satu sama lain. Sedangkan Bouman memberikan definisi masyarakat sebagai berikut: "Masyarakat adalah pergaulan hidup yang akrab antara manusia, dipersatukan dengan cara tertentu oleh hasrathasrat kemasyarakatan mereka. Lysen selanjutnya menjelaskan bahwa "Masyarakat adalah hubungan antara kekuatan-kekuatan dari bentuk-bentuk masyarakat dan dengan kehidupan individu. Dengan demikian dari beberapa pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat adalah pengumpulan manusia yang banyak dan bersatu dengan cara tertentu oleh karena hasrat-hasrat kemasyarakatan yang sama. Jadi ada beberapa syarat untuk timbulnya masyarakat, yaitu: 1) harus ada

pengumpulan manusia yang banyak, 2) telah bertempat tinggal di suatu daerah tertentu dalam waktu yang lama, 3) adanya aturan yang mengatur untuk kepentingan bersama.

Secara umum, dalam kehidupan masyarakat di perdesaan dapat dilihat dari beberapa karakteristik yang mereka miliki, sebagaimana dikemukakan oleh Roucek dan Warren (1963: 78) sebagai berikut:

- a. Mereka memiliki sifat yang homogen dalam hal (mata pencaharian, nilai-nilai dalam kebudayaan, serta dalam sikap dan tingkah laku)
- b. Kehidupan di desa lebih menekankan anggota keluarga sebagai unit ekonomi. Artinya semua anggota keluarga turut bekerja sama terlibat dalam kegiatan pertanian ataupun mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga.
- c. Faktor geografis sangat berpengaruh pada kehidupan yang ada (misalnya keterikatan anggota masyarakat dengan tanah atau desa kelahirannya)
- d. Hubungan sesama anggota masyarakat lebih intim dan awet dari pada di kota, serta jumlah anak yang ada dalam keluarga inti lebih banyak.